

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH (SAPD), AKUNTABILITAS KEUANGAN, KETAATAN PADA  
PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (AKIP)  
(Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta)**

**Oleh :**

**Johannes Fernando Carolus**

**Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta**

**Abstraksi**

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan di instansi pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta. Sedangkan sumber adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Populasi dalam penelitian ini adalah kabag keuangan di seluruh instansi pemerintah daerah Kotamadya Yogyakarta. Sedangkan teknik Pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan faktor kemudahan, dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, dan Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) sistem akuntansi pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Yogyakarta, yang berarti semakin baik sistem akuntansi pemerintah daerah maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat, 2) akuntabilitas keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Yogyakarta, yang berarti semakin baik akuntabilitas keuangan maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat dan 3) ketaatan peraturan perundang - undangan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Yogyakarta, yang berarti semakin baik ketaatan peraturan perundang - undangan maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat.

*Kata kunci: penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*